



MANUALBOOK



PENDAMPINGAN & PARTISIPASI

PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN UNTUK MASYARAKAT NELAYAN PESISIR

TIM PENELITI

2019

MANUAL BOOK
Pendampingan & Partisipasi

**PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN
UNTUK MASYARAKAT NELAYAN PESISIR**

Tim Peneliti

Universitas Negeri Gorontalo

2019

MANUAL BOOK

Pendampingan & Partisipasi

**PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN
untuk MASYARAKAT NELAYAN PESISIR**

Penyusun

Sukarman Kamuli

Tim Kerja

Jemmy A. Pakaja, M.Kom

Pratiwi Mardjun, S.Pd

Editor

Basri Amin

Konsultan Pakar

Prof. Dr. Ir. Mahludin Baruwadi, MP

Prof. Dr. Rauf Hatu, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Sukarman Kamuli & Basri Amin

Agustus 2019

Kata Pengantar

Manual Book ini adalah bentuk baru yang lebih praktis dan memandu para Pengambil Kebijakan dan Pendamping Lapangan ketika melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir. Meski sudah banyak *Juknis* yang ada, tetapi itu belum mencukupi agar bisa berfungsi lebih praktis di lapangan.

Visualitas yang dicoba dikembangkan dalam *Manual Book* ini memang masih membutuhkan penyempurnaan lanjutan hingga mencapai kondisi yang paling praktis bagi para Pendamping Lapangan.

Langkah awal, sebagai *pilot project* untuk penerapan *Manual Book* ini akan dilaksanakan di Gorontalo. Karena dari pengalaman riset selama kurang lebih 3 tahun di Provinsi Gorontalo akhirnya kami beroleh “rujukan empiris” dalam merumuskan sejumlah Model Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pesisir yang relevan dan berkelanjutan.

Akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang membantu *Manual Book* ini hingga mencapai tingkatannya seperti yang ada sekarang ini. Hanya kepada Allah SWT kami menyerahkan segalanya.

Gorontalo, Agustus 2019

Sukarman Kamuli

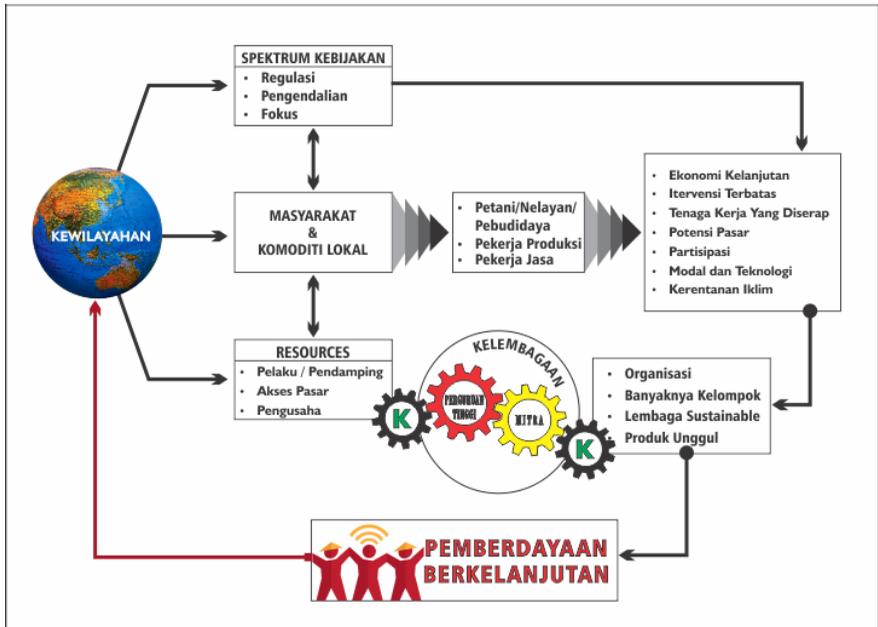
KERANGKA DASAR DARI MODEL MENJADI MANUAL

Model pemberdayaan masyarakat nelayan pesisir sejauh ini, baik yang diformulasikan oleh pemerintah maupun yang dikembangkan dan diusulkan oleh kalangan spesialis di bidang perikanan dan pemberdayaan masyarakat, pada umumnya meletakkan variabel-variabel kunci sebagai berikut:

1. Regulasi (pemerintah)
2. Kelembagaan
3. Modal dan teknologi
4. Akses pasar
5. Partisipasi masyarakat
6. Sumber daya manusia; dan
7. Infrastruktur

Kondisi partikuler yang nyaris tidak menjadi perhatian utama dan diletakkan sebagai faktor kunci dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

1. prinsip keberlanjutan;
2. leadership;
3. aktor lokal sebagai sumberdaya;
4. komoditi dan ikatan emosional-ekonomisnya di tingkat lokal, nasional dan global;
5. kelembagaan yang interaktif-dinamis dan berbasis “pengalaman bersama” dan kepentingan kewilayahan.



Model yang dikembangkan dan direformulasi secara fundamental melalui jalan penelitian ini di atas berhasil mengusulkan 1 (satu) model utama bernama **Model Pemberdayaan Berkelanjutan (Mordaya-Kejut)** dan 2 (dua) model turunan yang berisi:

1. “Skala (Perubahan) Pemberdayaan” (SPP); dan
2. “Skenario (Implementasi) Model” (SIM) yang selanjutnya menjadi “Manual Pemberdayaan Perempuan (MPP)” yang khusus akan dikerahkan untuk Perempuan dan Rumput Laut di Gorontalo.

Model Pemberdayaan Berkelanjutan

Model besar ini dikembangkan dengan titik picu dan dasar pacu operasionalnya dalam membedah dan menggerakkan perubahan adalah “kondisi wilayah”.

Melalui pemahaman dan review atas “sejarah wilayah”, struktur identitas masyarakat dan jaringan penghidupan masyarakatnya, maka (1) struktur kebijakan negara dan turunan regulasinya di-review sedemikian rupa untuk dilihat kapasitas implementasi dan paradoks-paradoks yang menyertainya di lapangan; (2) fokus pemberdayaan bertumpu pada (kondisi) masyarakat (mindset, etos kerja, leadership, budaya, jaringan sosial, dst) dan penguatan Komoditi yang eksis di setiap unit kerja (keluarga, kelompok, desa, kawasan tertentu, dst) yang menjadi basis material dari penghidupan masyarakat; (3) sumberdaya yang “menyatu”, “yang dimiliki” atau “yang pernah ada”, dan sumberdaya (potensial) “yang belum disadari/diyakini/ditemukan” oleh masyarakat setempat.

Model pemberdayaan ini diklaim sebagai MODEL BERKELANJUTAN karena model ini meng-cover interaksi yang luas tetapi secara cermat meletakkan garis-garis hubungan yang memandu setiap arus dan titik ordinat perubahan dalam setiap usaha pemberdayaan masyarakat.

Di tingkat regulasi, arus kerjanya akan terdeteksi hingga ke level daya intervensinya di tingkat wilayah atau kelompok, demikian juga dengan pengaruhnya hingga ke soal-soal iklim, modal dan teknologi dan fungsi motivasionalnya atas harga-harga pasar, peran pembudidaya atau pekerja produksi dan sumberdaya manusia (strategis) di setiap kelompok usaha masyarakat, yakni para pendamping dan pengusaha (lokal), serta ke-MITRA-annya dengan pihak Perguruan Tinggi dan lembaga perbankan.

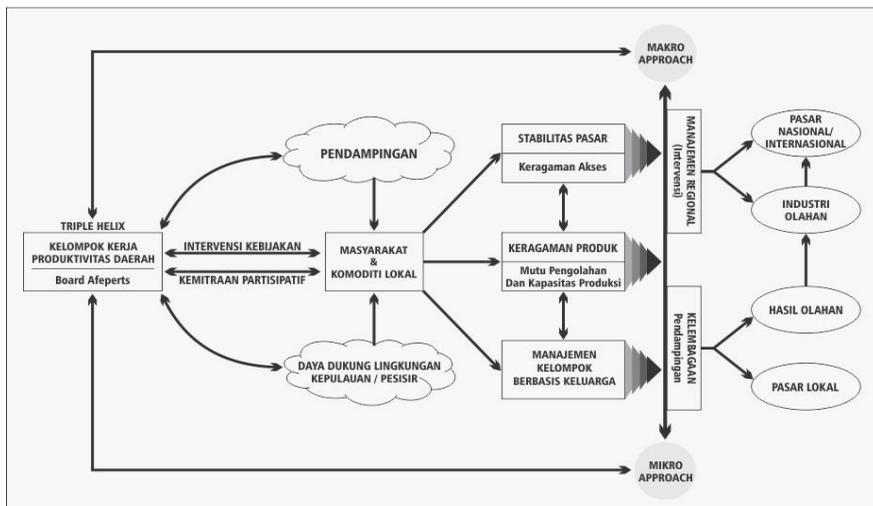
Di tingkat masyarakat, di sana akan terlihat jelas bagaimana pencermatan setiap kelembagaan yang beroperasi dalam melihat kapasitas diri dan dinamika eksternalnya dalam memperkuat kemitraan, maksimalisasi peran pendamping, kelompok pakar dan pengusaha, hingga pemanfaatan teknologi informasi, jaringan pasar dan penguatan kapasitas produksi yang unggul dan berdaya saing.

INTERAKSI DINAMIS antara setiap variabel dan aktor-aktor kunci yang menggerakkannya atau pun unsur-unsur lain yang mandek, lemah fokus, inkonsisten, dan/atau yang ‘hilang arah’ bisa sejak awal dibaca oleh Model ini. Dengan tingkat kejelasan (*clarity*) dan ketegasan gerak (*operationality*) dari setiap arus gerak dari masing-masing unsur (yang bekerja) dalam cakupan model ini, maka deteksi kelambanan, stagnasi, ataupun dorongan-dorongan spesifik untuk memperkuat percepatan inovasi dan daya gerak melakukan perbaikan yang lebih terstruktur bisa “dikelola” dan “dikawal” dari semua sisi, tingkatan, dan sektor.

SKENARIO IMPLEMENTASI MODEL (SIM)

Model yang diformulasi melalui riset ini tidak berhenti sebagai abstraksi yang hanya bertahan karena daya muatnya atas faktor-faktor dinamis dalam kerangka pemberdayaan masyarakat serta kejelasan strukturnya yang memudahkan sebagai “pegangan pengendali” di lapangan, tapi MODEL PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN ini juga dilengkapi dengan instrumen yang kami beri nama “**Skenario Implementasi Model**” (SIM).

Di bawah ini ditampilkan bagaimana bentuk SIM dimaksud, sebagai berikut:



IMPLEMENTASI untuk pemberdayaan masyarakat, menurut logika model *Mordaya-Kejut*, didefinisikan sebagai sejumlah interaksi, baik yang terstruktur maupun yang bersifat dinamis, dimana pusat interaksinya adalah “masyarakat dan komoditi”nya. Hanya di dalam dua situasi nyata itulah (masyarakat & komoditi) yang akan menjadi fokus pemberdayaan dan sekaligus sebagai pusat sirkulasi dari semua proses (implementasi) kebijakan dan berbagai bentuk usaha pemberdayaan masyarakat.

Masyarakat, baik sebagai kelompok, individu dan keluarga, termasuk ikatan kewilayahan yang mereka punyai (pulau, tanjung, gugusan pemukiman, dst) adalah SUBJEK yang otonom dalam mengelola penghidupannya. Tetapi, otonominya haruslah memberi tingkat kesejahteraan yang berkelanjutan dan hak-hak otonomi kesejahteraan itulah yang untuk “sementara” waktu membutuhkan kehadiran negara (melalui intervensi kebijakan) dan fasilitasi (kemitraan) dan pendayagunaan aset yang mereka miliki dan akses (pasar dan ilmu pengetahuan) yang membantu perbaikan penghidupan mereka.

1. Masyarakat membutuhkan “stabilitas pasar” atas produksi mereka;
2. Masyarakat membutuhkan pendampingan berkelanjutan yang produktif guna menopang “dalam jangka pendek dan menengah” akses pasar mereka dan pengelolaan asset produktif mereka;
3. Masyarakat membutuhkan kapasitas untuk berkemampuan “memproduksi” komoditi mereka dengan tingkat keunggulan tertentu (agar berdaya saing) dan *sustainable* (butuh teknologi, pendampingan, perbaikan keterampilan kerja, kontrol mutu produk dan *marketing*, kemampuan manajerial dan *leadership*, dst);
4. Kelembagaan yang berkelanjutan di masyarakat akan dicapai pada saatnya, yakni ketika daya dukung lingkungan, organisasi kerja, pendampingan dan kebijakan yang mapan dan memihak sudah benar-benar kuat di sektor negara, kemampuan regional dari lembaga-lembaga masyarakat, serta infrastruktur dasar sudah merata.

PENDEKATAN WILAYAH MANUAL – PENDAMPINGAN

Pastikan keadaan-keadaan berikut ini

1. Ketersediaan sumber daya alam dan basis produksi masyarakat;
2. Adanya anggota masyarakat/kelompok yang menggarap komoditas tertentu;
3. Kelembagaan dan kapasitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi (pendapatan) atau produktivitas masyarakat;
4. Kebijakan pembangunan yang menopang pelaksanaan program/kegiatan tertentu;
5. Kondisi keamanan wilayah dan kerentanan mengalami bencana;
6. Pasar setempat yang mendukung dan akses pasar yang lebih besar di luar wilayah;
7. Infrastruktur di wilayah yg beroleh “intervensi kebijakan” nelayan PESISIR.

DETEKSI
Program/
kegiatan yg
pernah ada
dan/atau yg
sedang
berjalan

Program Berbasis Potensi Wilayah

Mengenal *potensi wilayah* adalah agenda paling utama dalam menentukan jenis program/kegiatan yang akan berdampak kepada perbaikan kehidupan masyarakat. Meski demikian, dibutuhkan beberapa prosedur dasar dalam menentukan potensi wilayah dan bagaimana potensi tersebut dikelola baik dan berkelanjutan.

Prosedur Perumusan Prioritas Program Berbasis Potensi Wilayah



Pemetaan Potensi Wilayah :

1. Basis produksi adalah jenis-jenis komoditi nelayan PESISIR dan/atau kegiatan yang menjadi dasar atau pengungkit pendapatan masyarakat setempat. Ini penting sebagai “awal” atau pijakan dasar mengembangkan potensi masyarakat di wilayah perikanan/ kelautan/kepulauan;
2. Kondisi pasar (permintaan) dan potensinya yang terbuka hendaknya sejak awal dikenali dalam proses perumusan program, dengan begitu intervensi program menjadi tepat sasaran, sekaligus membantu masyarakat dan KELOMPOK dalam mendorong “diversifikasi” produk yg lebih fleksibel terterima di pasar sesuai nilai ekonomi yg dikandungnya. Secara hati-hati harus dicermati jangan sampai terjadi persaingan produk yang melemahkan kekuatan ekonomi masyarakat nelayan pesisir.

POTENSI WILAYAH

Kabupaten/KELOMPOK : _____

NO	POTENSI	JENIS	LOKASI	VOLUME (m ³ ,ton)	JUMLAH UNIT BISNIS DI MASYARAKAT	JUMLAH TENAGA KERJA
1	Rumput Laut					
2	Perikanan					
3	Produk Turunan, DST					

POTENSI INSTITUSIONAL KELOMPOK DAMPINGAN

KELOMPOK : _____

KETERANGAN	VOLUME	SATUAN	KETERANGAN
SARANA PRASARANA PENDUKUNG			
KELEMBAGAAN YANG DIMILIKI			
SDM PENDUKUNG			

Kondisi dan Rencana Aksi

Kondisi Terkini:

1. Jenis-jenis intervensi kegiatan/program yang mempengaruhi performa kehidupan masyarakat saat ini. Juga penting dipastikan bahwa unit-unit usaha yang eksis di masyarakat terpacu dengan intervensi kegiatan yg tengah berjalan;

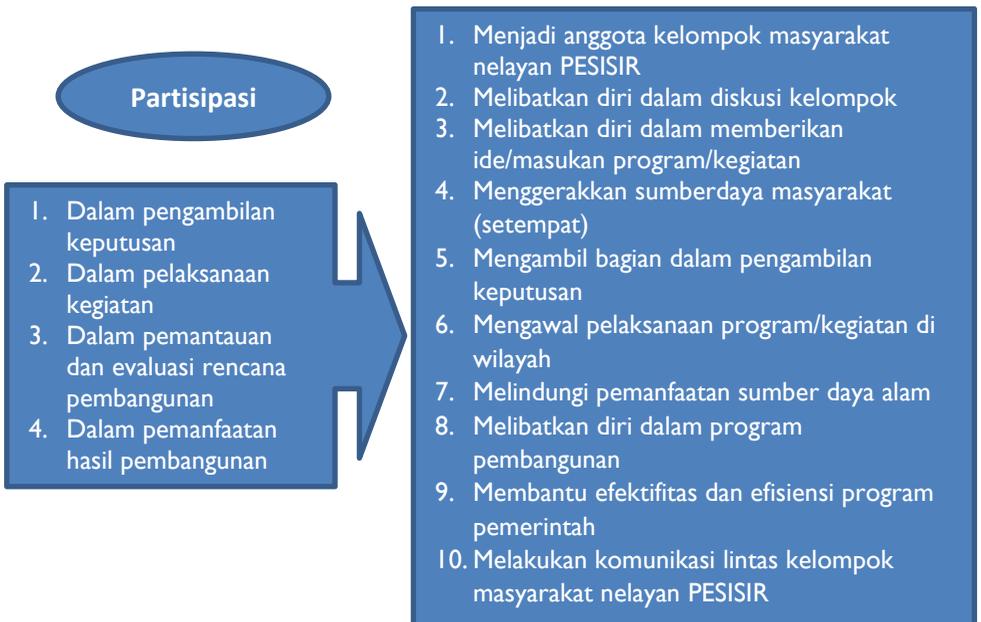
Partisipasi dan Keberlanjutan

Partisipasi merupakan unsur penting yang menentukan apakah sebuah program/kegiatan bisa menopang keberlanjutannya di masyarakat. Partisipasi mengandung makna kerelaan dan kesadaran akan kepentingan seseorang atau sekelompok masyarakat.

Partisipasi yang sadar adalah kunci pemberdayaan dan perbaikan. Hal ini membutuhkan pengalaman/pengetahuan bersama dan kemandirian dalam menyatakan pendapat dan dalam mengerjakan kegiatan produktif, sekaligus melembagakannya dalam bentuk-bentuk kegiatan komunikasi, bekerja bersama dan terlibat dalam mengawal dan memastikan pencapaian tujuan program/kegiatan.

A. Pola Partisipasi

Secara sederhana, partisipasi bisa digambarkan sebagai berikut:



Keberlanjutan kegiatan melalui beragam jalur komunikasi dan partisipasi akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor:

1. Manfaat yang diperoleh
2. Program yang relevan, bukan program pengulangan
3. Hubungan antara orang-orang kunci
4. Hasil-hasil jangka pendek
5. Keadilan dalam kegiatan

1. Daftarkan manfaat apa saja yang masyarakat peroleh?;
2. Dimana LOKASI program/kegiatan?
3. Daftarkan program yg pernah dan/atau sedang berjalan? Baru atau pengulangan?
4. Siapa-siapa saja yg terlibat? Tulisan nama-nama dan posisi mereka?
5. Hasil-hasil jangka pendek apa saja yg NYATA memberi pengaruh?
6. Apakah semua kelompok masyarakat terlibat dalam program? Kelompok perempuan beroleh manfaat apa secara langsung?

Dimana partisipasi masyarakat berlangsung dan bagaimana prosedurnya agar berkelanjutan?

1. KELOMPOK & PENDAMPING melakukan pertemuan di kelompok-kelompok masyarakat pada level pulau, kawasan pesisir, desa dan kecamatan;
2. Forum partisipasi hendaknya berusaha maksimal memetakan:
 - Potensi paling relevan dan menjawab kebutuhan masyarakat setempat;
 - Mengambil keputusan “rencana aksi” yg melibatkan pelaku-pelaku kunci yg bersentuhan langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
 - Jalur-jalur komunikasi yang lebih transparan di antara stakeholders pesisir;
 - Sharing informasi bersama tentang perubahan/perbaikan (dampak) yg terjadi dengan intervensi program yang ada;
 - Mengantisipasi kerentanan/resiko yang akan terjadi (kondisi alam, perubahan pasar, kondisi komoditi, harga-harga kebutuhan usaha, dst).

Mekanisme Partisipasi dan Tujuannya di Setiap Unit KELOMPOK NELAYAN PESISIR

NAMA FORUM PARTISIPASI (Nama dan levelnya: Pulau/Desa/Kecamatan)	PELAKU KUNCI YG TERLIBAT (Institusi pemerintah, pelaku bisnis dan pimpinan/anggota kelompok masy)	JENIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN (Penentuan Program, Pembentukan Kelompok, dll)	RENCANA AKSI BERSAMA (Daftar Kegiatan dan Lokasinya, Waktu)	SEKTOR KEGIATAN YANG DIEVALUASI (Dampak, Anggaran, Partisipasi Masyarakat)

Pangkalan Data Program Berbasis Potensi Wilayah PESISIR Gorontalo

Data tidak sekadar angka-angka yang fokus kepada program/kegiatan di sektor PESISIR. Data lebih menunjuk kepada kondisi yang faktual dan yang bersifat “potensi”, hal mana membutuhkan sumber-sumber data yang lebih beragam (dari lembaga pemerintah, sektor bisnis, kelompok masyarakat, kelompok ahli, publikasi ilmiah, dst). Hal inilah yang hendak dibangun di tingkat Kabupaten.

Integrasi data akan memudahkan perencanaan program PESISIR yang benar-benar menjawab “kebutuhan” masyarakat, sekaligus menjadi rujukan dalam melihat kontribusi sektor Pesisir dalam pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB), khususnya dalam hubungannya dengan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan unit-unit usaha masyarakat yang dapat mengurangi kemiskinan masyarakat dan perbaikan daya dukung sumber daya Pesisir di provinsi Gorontalo.

Integrasi Data PESISIR Provinsi Gorontalo (Cth: GORUT)

Program Prioritas & Lokasi Rencana Aksi	<ul style="list-style-type: none">• Potensi Wilayah PESISIR• Program Prioritas/Tahun Anggaran• Kelembagaan Terkait
Kapasitas Anggaran	<ul style="list-style-type: none">• Usulan Anggaran (Proposal)• Efektifitas/Dampak Program
Dampak & Keberlanjutan Program	<ul style="list-style-type: none">• Rencana Pengelolaan Program Jk Panjang• Partisipasi masyarakat• Daya dukung Lingkungan

Integrasi DATA di tingkat provinsi pada sektor PESISIR bisa dicapai dengan pelibatan stakeholders secara intensif melalui forum-forum lintas pelaku.

Selain itu, format-format yang disediakan dalam *Manual Book* ini akan membantu setiap jenjang dalam hal:

1. Perumusan data potensi wilayah (basis produksi, luas lahan, nilai ekonomi, dsb);
2. Keterlibatan instansi pemerintah, funding internasional, kelembagaan masyarakat dan pelaku usaha;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung;
4. Kesesuaian antar jenis-jenis program, posisi lokasi dan alokasi anggaran;
5. Identifikasi dampak-dampak strategis yg dicapai/belum dicapai di setiap KELOMPOK;
6. Faktor-faktor penunjang dan penghambat, baik secara aktual maupun bersifat laten;
7. Penentuan Stok Kegiatan, kemauan kolektif dan kapasitas setempat dalam menggerakkan potensi dan kemandirian lokal;
8. Kegiatan-kegiatan yg mengantisipasi perubahan iklim/ permintaan pasar, perubahan iklim dan fluktuasi harga dan produksi, dst.

